

Kedatangan Jepang Sebagai Awal Mula Penderitaan Wanita Di Indonesia Pada Tahun 1942-1945

**Ibnu Daffa Ramadhan¹, Mhd.Juniawan Ritonga², Askohar³,
Ahmad Maftuh Sujana⁴**

^{1,2,3,4} UIN Sultan Maulana Hasamuddin Banten, Serang, Banten
Email Koresponden: ibnudaffa380@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem perbudakan seksual militer Jepang, yang dikenal sebagai “Jugun Ianfu,” selama pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). Sistem ini secara paksa menyediakan perempuan sebagai alat pemuas nafsu seksual bagi tentara Jepang di seluruh wilayah pendudukan. Artikel ini menelusuri sejarah Jugun Ianfu di Indonesia, mulai dari proses rekrutmen, kondisi di fasilitas penahanan, hingga dampaknya terhadap korban secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Melalui analisis historis, artikel ini mengungkap bagaimana sistem tersebut dibangun, bagaimana perempuan Indonesia menjadi korban, dan bagaimana trauma yang mereka alami telah memengaruhi generasi mendatang. Artikel ini menekankan pentingnya memahami sejarah kelam Jugun Ianfu untuk menghormati perjuangan para korban, mengadvokasi pengakuan atas penderitaan mereka, dan mencegah tragedi serupa di masa mendatang.

Kata kunci : Jugun Ianfu, Pendudukan Jepang di Indonesia, Perbudakan Seksual, Perempuan Indonesia

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dalam sejarah bangsa Indonesia merupakan isu yang tak terpisahkan. Dalam berbagai momen kelam, perempuan sering kali diperbudak dan menjadi sasaran dalam situasi yang sangat mengerikan tanpa sepengetahuan mereka. Sejak lama, perempuan telah diposisikan sebagai objek dalam konflik bersenjata, perebutan kekuasaan, maupun agresi. Salah satu periode gelap yang menunjukkan pembungkaman suara perempuan adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945. Pada masa ini, terjadi eksploitasi besar-besaran, di mana banyak perempuan dipaksa dijadikan budak dan pelacur bagi tentara Jepang. Mereka direduksi menjadi objek seksual, diperlakukan seolah-olah mereka hanyalah barang, dan sering kali mengalami kekerasan. Dalam pandangan masyarakat pada waktu itu,



mereka dianggap sebagai perempuan yang rendah derajatnya dibandingkan laki-laki.

Selama pendudukan, Jepang menerapkan berbagai sistem untuk memobilisasi rakyat Indonesia, salah satunya adalah "Sistem Perbudakan Seksual Militer Jepang. " Sistem ini secara paksa menyediakan perempuan sebagai sarana praktik seksual untuk tentara Jepang di seluruh wilayah pendudukan. Dalam konteks ini, perempuan yang terlibat disebut Jugun Ianfu. Kebijakan pengelolaan hiburan dalam ketentaraan pun diatur oleh Pusat Komando Tentara, dan diketahui oleh pihak Kekaisaran Jepang. Hiburan seksual ini dikontrol secara terpusat, terutama ketika para tentara berada di barak dan membutuhkan wanita sebagai bentuk hiburan. Ketika Jepang mendarat di pulau Jawa, mereka sangat memerlukan perempuan yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut (Rahma et al., 2020).

Dengan memahami sejarah kelam ini, kita dapat menghargai perjuangan para korban Jugun Ianfu, mendorong pengakuan atas penderitaan mereka dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Membongkar sejarah kelam Jugun Ianfu merupakan bentuk penghormatan terhadap korban dan langkah penting dalam mengupayakan keadilan sejarah dan membangun masa depan yang lebih manusiawi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis untuk menelusuri praktik perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap perempuan Indonesia selama masa pendudukan tahun 1942–1945. Metode ini terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan temuan dalam bentuk historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan dokumentasi (Wijaya et al., 2025). Tahap pengumpulan sumber dilakukan dengan menghimpun dokumen, mengunjungi situs sejarah, serta mewawancarai saksi mata atau pihak yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Selanjutnya, keaslian dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh diuji melalui kritik ekstern dan intern. Fakta-fakta yang telah

diverifikasi kemudian diinterpretasikan untuk memahami maknanya dan merangkai sebuah narasi sejarah yang koheren. Pada tahap akhir, hasil interpretasi disusun menjadi sebuah narasi sejarah yang utuh, komprehensif, dan objektif (Zulaicha, 2014).

Pembahasan

A. Kependudukan Jepang di Indonesia

Dalam Sejarah Indonesia Jepang kadang-kadang disebut sebagai penguasa yang menggantikan Hindia Belanda, sebutan untuk Indonesia pada masa kolonial Belanda. Setelah ladang-ladang emas milik Belanda di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku runtuh, Jepang dengan mudah menguasai ladang emas utama yang terletak di Batavia (sekarang Jakarta). Di wilayah Jawa, Jepang menempatkan Divisi ke-2 di Jawa Barat yang diperuntukkan bagi kelompok elit, serta Divisi ke-48 di Jawa Tengah. Operasi militer ini berada di bawah komando Jenderal Hitoshi Imamura, yang memimpin ekspedisi militer besar untuk memperkuat dominasi Jepang (Wulandari et al., 2024).

Sementara itu, kekuatan Jepang juga diperkuat oleh Divisi ke-38 yang dipimpin oleh Kolonel Shoji. Ekspansi Jepang ke wilayah timur Indonesia turut memengaruhi arus ekspor. Meski kemampuan militer Jepang tergolong kuat, pertahanan dari pihak Belgia telah mengalami kemunduran sejak pertempuran sebelumnya. Sebagai negara yang menganut militerisme, Jepang memainkan peran penting di Asia, dan pengaruhnya sangat besar terhadap gerakan-gerakan nasional di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menandai awal era baru dalam konflik global. Beberapa pejabat pemerintah Indonesia bahkan pernah menyatakan bahwa kemungkinan bencana di wilayah Lautan Pasifik bisa terjadi di masa depan. Pernyataan ini didasarkan pada analisis politik, yang menunjukkan bahwa evolusi politik Indonesia ditandai dengan sikap tegas menolak bentuk-bentuk fasisme eksternal. Hal ini secara eksplisit disampaikan oleh Gabungan Angkatan Politik Indonesia (GAPI).

Di Pulau Jawa, dikenal sebuah ramalan dari Prabu Jayabaya yang menyebutkan bahwa suatu hari nanti, pulau ini akan diserang oleh bangsa berkulit kuning, namun serangan tersebut tidak akan berlangsung lama, dan setelah itu Indonesia akan meraih kemerdekaannya. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, kehadiran mereka tidak disertai dengan pemaksaan atau eksploitasi langsung seperti yang dilakukan Belanda, sehingga banyak masyarakat melihat kedatangan Jepang sebagai sesuatu yang tidak biasa. Kehadiran imigran Jepang yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa bahkan sempat menciptakan kesan bahwa jumlah mereka melebihi pasukan Sekutu. Kekalahan pihak Belgia juga turut memperkuat posisi Jepang. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang dari Angkatan Darat ke-16 berhasil melakukan serangan di tiga lokasi berbeda: Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Tak lama setelah itu, pada 5 Maret 1942, Batavia (Jakarta) dinyatakan sebagai "kota terbuka" oleh Jepang, menandai berakhirnya dominasi Jerman di kota tersebut. Jepang kemudian secara perlahan menguasai wilayah sekitar Batavia, termasuk Bogor.

Walaupun pemerintah Belgia memberikan peringatan keras, Jepang tetap berhasil menguasai Bandung pada 1 Maret 1942 dan mengganti nama kota tersebut. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji, yang membawa sekitar 5.000 tentara melalui Eretan, dekat Cirebon, hingga berhasil menstabilkan wilayah Subang. Saat mereka mendekati Bandung, pasukan Jepang melewati Lembang dan Sumedang, disambut meriah oleh masyarakat pedesaan dengan seruan "banzai," sebagai bentuk dukungan. Penduduk Bandung saat itu menganggap Jepang sebagai bangsa yang baik hati dan percaya bahwa mereka akan melindungi kepentingan Indonesia dari pengaruh Amerika Serikat. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencoba kembali mendekati wilayah Kalijati, yang hanya berjarak sekitar 40 kilometer dari Bandung. Namun, mundurnya pasukan Jerman terus berlangsung hingga 4 April 1942, saat Jepang berhasil menguasai wilayah tersebut sepenuhnya (K.Sofianto, 2014).

Pada 7 Maret 1942, seorang tentara Belgia di sekitar Bandung meminta bantuan dari masyarakat setempat. Kolonel Shoji kemudian

menyampaikan laporan tersebut kepada Jenderal Imamura. Meskipun begitu, bantuan dari penduduk lokal hanya akan efektif jika didukung penuh oleh seluruh pasukan Sekutu di Jawa. Jepang memberikan ultimatum: jika pemerintah Belgia menolak untuk mematuhi, maka Bandung akan menjadi target serangan udara. Sebagai langkah lanjutan, Jenderal Imamura juga mempersiapkan kehadiran Gubernur Jenderal Belanda dalam pertemuan penting di Kalijati. Jika situasi terus berkembang seperti itu, serangan terhadap Bandung akan segera dilancarkan. Namun pada akhirnya, tekanan dari pemerintah Belgia terhadap Jepang semakin meningkat. Menteri Utama Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, yang juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, bersama sejumlah pejabat lainnya beberapa di antaranya buta huruf melakukan perjalanan ke Kalijati untuk berunding.

Kemudian, pada 9 Maret 1942, kekuasaan atas wilayah Indonesia resmi berpindah ke tangan pemerintahan militer Jepang. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 (Osamu Seirei) yang diterbitkan oleh Panglima Tentara Jepang ke-16 pada 7 Maret 1942, seluruh kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan Gubernur Jenderal Belanda kini diambil alih oleh militer Jepang, yang dipimpin oleh balatentara Nippon.

Dalam praktiknya, sistem pemerintahan militer ini dijalankan oleh dua cabang militer Jepang, yakni Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun). Masing-masing memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Pembagian wilayah Indonesia berdasarkan kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Pulau Jawa dan Madura, dengan pusat pemerintahan di Batavia (Jakarta), berada di bawah kekuasaan Rikugun (Angkatan Darat Jepang). *Kedua*, Sumatera dan Semenanjung Malaya, yang pusatnya berada di Singapura, juga dikuasai oleh Rikugun. *Ketiga*, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian (Papua) berada di bawah kendali Kaigun (Angkatan Laut Jepang).

Meski memiliki tujuan yang sama, Rikugun dan Kaigun sering kali bersaing untuk merebut simpati rakyat jajahan. Hingga akhir perang,

semua wilayah militer Jepang di Asia Tenggara berada di bawah komando Panglima Besar yang berkedudukan di Saigon, dan baru kemudian terhubung langsung ke pusat kekuasaan di Tokyo.

B. Penindasan Jepang Terhadap Wanita Indonesia

Sejarah kelam penjajahan Jepang di Indonesia mencatat penderitaan yang dialami kaum wanita. Para perempuan di tanah jajahan ini dijadikan sebagai Jugun Ianfu, yang secara kasar dapat disebut sebagai budak seks bagi tentara Jepang. Sebelum kedatangan Jepang, negara tersebut telah melakukan rekrutmen massal terhadap perempuan untuk dijadikan pelepas nafsu mereka. Perempuan-perempuan ini berasal dari negara-negara yang menjadi wilayah jajahan Jepang, seperti Filipina, Korea, Cina, Belanda, Rusia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar.

Awalnya, Jepang merekrut perempuan yang ingin menjadi Jugun Ianfu secara sukarela. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkurangnya kekuatan akibat peperangan, praktik kejam ini berkembang. Di wilayah jajahan mereka di Cina, militer Jepang melakukan pemerkosaan masal tanpa memandang usia atau latar belakang. Akibat tindakan brutal ini, banyak tentara Jepang yang terjangkit penyakit menular, yang pada gilirannya mengganggu kekuatan dan kesehatan pasukan di sana. Setelah insiden tersebut, Jepang mulai melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap perempuan yang mereka rekrut, termasuk di Indonesia.

Jepang memandang sistem Jugun Ianfu sebagai tindakan patriotik dan mulia. Pada awal pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang berupaya menanamkan nilai-nilai Hakko I Chiu kepada perempuan Indonesia, berusaha melibatkan mereka dalam kehidupan sosial sehingga mereka tak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu filosofi yang menutupi kebiadaban dengan indah kata. Perempuan Indonesia dipaksa untuk merasa rela dan bahagia menyumbangkan diri mereka dalam sistem ini. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang terjebak oleh iming-iming pekerjaan, sementara yang lainnya diculik secara paksa oleh tentara Jepang dan dibawa ke Ianjo, barak militer, serta rumah

pelacuran untuk dijadikan budak seks (Sari, 2023). Jugun Ianfu, sistem yang pertama kali dibentuk pada tahun 1932, diciptakan atas perintah Kaisar Hirohito yang langsung disampaikan kepada Jenderal Okabe Nao Saburo dan Okamuji Yauji. Penerapan awal sistem ini terjadi di Shanghai, China, yang menjadi negara jajahan pertama Jepang dalam serangkaian invasi mereka. Setelah itu, Jepang meluaskan penerapan Jugun Ianfu ke wilayah-wilayah jajahan lainnya.

Sistem Jugun Ianfu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan militer tentara Jepang yang mengalami kelelahan mental akibat perang yang berkepanjangan dan tak kunjung berakhir. Situasi ini menyebabkan meningkatnya kasus pemerkosaan di wilayah yang mereka jajah. Namun, jika praktik pemerkosaan ini terus berlangsung tanpa memperhatikan kesehatan perempuan yang diperlakukan secara kasar oleh tentara, hal ini akan berisiko menurunkan daya tempur mereka akibat penyakit menular. Oleh karena itu, Kaisar Hirohito memberlakukan sistem Jugun Ianfu dengan memilih hanya perempuan yang sehat untuk melayani para tentara. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh peristiwa tragis pemerkosaan massal di Nanking, China, pada tahun 1937, yang dikenal sebagai “The Rape of Nanking,” di mana tentara Jepang telah melakukan kekejaman terhadap ratusan perempuan China. Tragedi ini mencoreng citra Jepang dan menimbulkan kecaman luas di tingkat internasional, serta berujung pada meningkatnya angka penyakit di kalangan tentara dan penurunan kekuatan militer yang membutuhkan pengobatan mahal.

Selama Perang Dunia II, para jugun ianfu ditempatkan di lokasi-lokasi seperti ianjo, yaitu tempat praktik prostitusi militer, atau di barak lain. Istilah ianjo merujuk pada tempat khusus yang diperuntukkan bagi prostitusi oleh tentara Jepang, di mana wanita yang berada di dalamnya tidak diperkenankan keluar tanpa izin khusus, dan sering kali dikelilingi oleh kawat berduri seperti kamp tahanan untuk mencegah pelarian.

Jepang memandang sistem Jugun Ianfu sebagai tindakan patriotik yang mulia. Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah berusaha menanamkan nilai Hakkō ichiu, yang berarti “Delapan Sudut

Dunia, Satu Atap.” Filosofi ini mencerminkan ambisi Jepang untuk menyeragamkan dunia di bawah kekuasaannya, dan konsep ini diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial dengan menciptakan ilusi moralitas dan pengabdian. Tanpa disadari, banyak perempuan Indonesia, khususnya remaja, menjadi korban dari sistem yang secara halus mengeksploitasi mereka, sehingga mereka merasa seolah-olah secara sukarela menyerahkan diri dalam kerangka Jugun Ianfu (Farisa et al., 2024).

Inilah awal dari sejarah kelam yang akan selalu diingat oleh para korban hingga akhir hayat mereka. Munculnya sistem Jugun Ianfu merupakan hasil dari ambisi Jepang dalam Perang Dunia II. Restorasi Meiji, yang berlangsung antara tahun 1867 hingga 1912, menorehkan perubahan sosial di Jepang, mendorong mereka untuk melakukan ekspansi ke negara lain, termasuk Indonesia, guna memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat dan memperluas wilayah pengaruh. Filsafat Hakko I Chiu, yang menekankan kesatuan keluarga umat manusia, menjadi ideologi yang mendasari cita-cita Jepang untuk membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Namun, perang yang berkepanjangan dan kondisi medan pertempuran yang berat memicu kelelahan fisik dan mental tentara Jepang, serta meningkatnya kasus penyakit kelamin. Kondisi ini mendorong Dokter Aso Tetsuo untuk merekomendasikan pembangunan fasilitas prostitusi yang diawasi langsung oleh militer di Tokyo, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin dan menjaga kekuatan militer Jepang.

Sebagai respons atas rekomendasi tersebut, pemerintah Jepang mendirikan rumah pelacuran (ianjo) yang dikelola secara terstruktur, dengan merekrut perempuan yang dikenal sebagai Jugun Ianfu atau comfort women untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang. Pendirian ianjo tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin, namun juga untuk mengurangi izin istirahat tentara dan meningkatkan moral serta kinerja militer. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, mereka mendatangkan Jugun Ianfu dari Korea dan Cina. Namun

seiring waktu, kebutuhan yang semakin besar mendorong mereka untuk mulai merekrut perempuan Indonesia dan Belanda, yang kemudian menjadi bagian integral dalam sistem Jugun Ianfu.

Pengorganisasian Jugun Ianfu oleh militer Jepang sangat terstruktur dan terkontrol. Sistem ini dimulai dari perencanaan dan strategi perekrutan, pengaturan pihak-pihak yang terlibat, hingga penempatan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para Jugun Ianfu. Pengelolaan ianjo dilakukan oleh orang-orang Jepang dan orang-orang Indonesia di bawah pengawasan ketat militer Jepang. Militer Jepang membagi ianjo menjadi enam tipe, dengan lokasi dan penghuninya yang berbeda-beda, mulai dari yang di luar pulau Jawa hingga yang dihuni oleh perempuan-perempuan dari berbagai wilayah jajahan Jepang, termasuk perempuan Belanda. Meskipun tidak semua Jugun Ianfu menjadi korban penipuan dan pemaksaan, sistem perekrutannya tetap melanggar hak asasi manusia.

Militer Jepang juga menerapkan aturan ketat terkait kesehatan Jugun Ianfu. Setiap perempuan yang akan menjadi Jugun Ianfu harus diseleksi kesehatannya oleh dokter, dengan fokus pada kesehatan kelamin. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah para perempuan masih perawan atau tidak, dan apakah mereka memiliki penyakit kelamin. Para Jugun Ianfu yang dinyatakan sehat ditempatkan di tempat khusus yang menyerupai asrama, sementara yang tidak sehat ditempatkan di tempat lain seperti club atau tempat hiburan malam. Para Jugun Ianfu juga diberi nama Jepang dan nomor kamar sebagai bagian dari upaya manipulasi dan pengaburan identitas mereka. Militer Jepang mengelola Jugun Ianfu sebagai aset yang terstruktur dan terkontrol untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang, dengan aturan yang ketat terkait tiket masuk, jam berkunjung, kontrol kesehatan, dan pemberian kondom. Sistem ini membuat masyarakat saat itu berpikir bahwa para Jugun Ianfu adalah karena kehendak mereka sendiri, bukan paksaan, sehingga sering menghina mereka dengan sebutan ransum Jepang (Suliyati, 2018).

C. Tokoh-tokoh Wanita yang Berperan Pada Masa Kependudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945 bukan hanya meninggalkan penderitaan, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk perlawanan dari kaum perempuan. Perlawanan ini tidak selalu berbentuk fisik atau militer, melainkan banyak yang bersifat pasif, simbolis, dan kultural.

Beberapa bentuk perlawanan perempuan antara lain: Perlawanan Psikologis dan Moral: Banyak perempuan Indonesia yang menolak menjadi bagian dari sistem eksploitatif Jepang, seperti menolak menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur. Meski ancaman fisik dan tekanan besar, penolakan ini merupakan bentuk perlawanan yang bermakna. Perlawanan Melalui Jaringan Sosial dan Informasi: Para perempuan turut berperan menyebarkan informasi rahasia, membantu logistik pejuang, dan menjadi bagian dari jaringan perlawanan bawah tanah.

Perlawanan Kultural: Beberapa perempuan tetap menjaga adat, budaya, dan identitas bangsa sebagai bentuk penolakan terhadap asimilasi paksa dan propaganda Jepang. Solidaritas di antara perempuan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi masa sulit pendudukan Jepang. Beberapa bentuk solidaritas tersebut adalah: Pembentukan Kelompok-kelompok Perempuan: Meski diawasi ketat, kelompok informal perempuan muncul untuk saling membantu, seperti dalam penyediaan makanan, tempat persembunyian, hingga perawatan korban kekerasan. Dukungan Terhadap Korban Jugun Ianfu: Banyak perempuan dan keluarga yang diam-diam memberikan dukungan moral maupun materi bagi mereka yang menjadi korban sistem perbudakan seksual Jepang.

Perjuangan Kolektif Pasca Pendudukan: Setelah Jepang kalah, banyak perempuan yang bersatu untuk memperjuangkan keadilan dan pengakuan bagi korban kekerasan seksual, meski perjuangan ini memakan waktu panjang dan tidak mudah. Solidaritas ini bukan hanya wujud perlawanan pasif, tetapi menjadi pondasi penting untuk perjuangan hak-hak perempuan di masa-masa setelah kemerdekaan. Perlawanan Kultural: Beberapa perempuan tetap menjaga adat, budaya, dan identitas bangsa

sebagai bentuk penolakan terhadap asimilasi paksa dan propaganda Jepang.

Di tengah keterbatasan ruang gerak dan penindasan yang berat, beberapa tokoh perempuan Indonesia tetap menunjukkan kiprah dan peran penting dalam perlawanan, di antaranya:

Pertama, Hajjah Rasuna Said. Meskipun aktivitas politik sangat dibatasi oleh pemerintah pendudukan Jepang, Rasuna Said tetap dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan dan tokoh nasionalis yang gigih dari Sumatra Barat. Ia aktif membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan perempuan melalui pendidikan, pidato-pidato yang lantang, dan ceramah yang membangkitkan kesadaran nasional, meski selalu diawasi ketat oleh pihak berwenang.

Kedua, S. K. Trimurti. Sebagai seorang jurnalis, guru, dan aktivis, Trimurti berani menulis dan menyebarkan informasi yang memotivasi rakyat untuk tetap berjuang, meskipun berada di bawah ancaman sensor dan pengawasan ketat militer Jepang. Tulisan-tulisannya yang tajam menjadi salah satu media penting untuk menjaga semangat rakyat Indonesia dalam melawan penindasan, meski ia sendiri sempat mengalami penangkapan pada masa kolonial.

Ketiga, Dewi Sartika. Walaupun kiprahnya lebih dikenal sebelum masa pendudukan Jepang, perjuangannya di bidang pendidikan perempuan tetap menjadi sumber inspirasi pada masa sulit tersebut. Melalui sekolah yang ia dirikan, Sakola Kautamaan Istri, dan melalui pengaruh pemikirannya, banyak perempuan tetap bersemangat melanjutkan pendidikan di tengah situasi yang menekan, sehingga warisannya tetap hidup dan memberi kekuatan bagi kaum perempuan untuk bertahan dan berjuang.

D. Dampak Bagi Korban *Juguan Ianfu*

Tragedi *jugun ianfu* adalah salah satu bentuk kekerasan seksual sistematis paling brutal dalam sejarah modern. Ribuan perempuan dari berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, dipaksa menjadi budak seks

bagi tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Mereka dijanjikan pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya mereka justru dijadikan pemuas hasrat militer Jepang di kamp-kamp atau barak yang disebut “rumah penghibur” (comfort stations). Setelah perang usai, dampak dari kekejaman ini tidak sertamerta hilang. Luka yang mereka alami terbawa seumur hidup, dan bahkan berdampak lintas generasi.

1. Dampak Fisik

Korban jugun ianfu mengalami penderitaan fisik yang sangat berat. Mereka dipaksa melayani tentara setiap hari dalam jumlah yang tidak manusiawi, tanpa perlindungan atau perhatian terhadap kesehatan. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka mengalami kerusakan pada organ reproduksi, luka-luka yang tak kunjung sembuh, serta infeksi penyakit menular seksual seperti sifilis dan gonore. Selain itu, sebagian besar korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran akibat pemerkosaan berulang, dan bahkan dipaksa menggugurkan kandungan secara paksa dengan cara yang sangat menyakitkan dan tidak higienis (Tanaka, 2002).

Sebagian besar korban mengalami infeksi penyakit kelamin seperti sifilis dan gonore, tetapi tidak mendapatkan akses pengobatan. Banyak dari mereka yang mengalami keguguran berulang karena dipaksa untuk tetap melayani meskipun dalam kondisi hamil atau sakit. Bahkan dalam beberapa laporan, korban yang tidak lagi “produktif” dibunuh atau dibiarkan mati karena sakit (McDougall, 1998).

2. Dampak Psikologis

Selain penderitaan fisik, para korban juga mengalami trauma psikologis berat. Mereka mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi berat, dan kecemasan berkepanjangan. Rasa malu, takut, dan bersalah menguasai hidup mereka selama puluhan tahun. Sebagian dari mereka memilih tidak menikah, tidak memiliki anak, atau menyembunyikan masa lalunya dari keluarga karena khawatir ditolak masyarakat (Perempuan, 2013). Bahkan setelah perang berakhir, korban

tidak memiliki ruang untuk bercerita. Mereka mengalami pembungkaman sosial dan politik, serta kekosongan hukum yang tidak memberikan perlindungan. Banyak yang menanggung trauma dalam diam hingga akhir hayatnya (Lestari, 2017).

3. Dampak Sosial

Stigma sosial menjadi beban besar yang ditanggung oleh para korban. Masyarakat tidak memberikan empati, justru menyalahkan korban karena dianggap "tidak suci" atau "perempuan rusak". Para korban mengalami pengucilan, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Beberapa bahkan tidak diakui lagi oleh keluarganya setelah kembali ke kampung halaman (Fitriani, 2021).

Label negatif tersebut menyebabkan mereka hidup dalam keterasingan sosial, dan sebagian dari mereka enggan membentuk keluarga karena takut masa lalu mereka diketahui oleh pasangan atau anak-anak. Pengalaman sebagai jugun ianfu menjadi rahasia kelam yang terkubur dalam tubuh dan jiwa mereka.

4. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, para korban mengalami kemiskinan struktural. Setelah perang, mereka kembali dalam keadaan tanpa harta, cacat fisik, dan tidak memiliki keterampilan kerja. Pemerintah Jepang tidak memberikan kompensasi langsung, sementara pemerintah Indonesia pun lama tak mengakui nasib mereka. Upaya untuk mencari keadilan dilakukan melalui pengadilan dan diplomasi, namun hasilnya sangat terbatas.

Misalnya, pembentukan Asian Women's Fund oleh Jepang pada 1995 hanya memberikan bantuan simbolis, bukan sebagai tanggung jawab resmi negara. Sebagian korban menolak bantuan ini karena menganggapnya sebagai cara Jepang menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah (International, 2007).

5. Dampak Lintas Generasi

Trauma korban tidak berhenti pada dirinya saja. Anak-anak dan cucu mereka merasakan dampak psikososial yang membekas. Sebagian

tumbuh dalam keluarga dengan pola komunikasi yang tertutup, emosional yang tidak stabil, dan konflik internal yang tak disadari berasal dari trauma yang diwariskan. Dalam beberapa kasus, keluarga baru mengetahui masa lalu korban ketika sang nenek atau ibu sudah sangat tua atau menjelang meninggal dunia. Anak cucu korban kini mulai aktif dalam advokasi hak asasi manusia, membawa kisah keluarga mereka ke ruang publik sebagai bentuk pemulihan identitas dan sejarah (Heijmans, 2020).

Kesimpulan

Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) menorehkan luka mendalam bagi bangsa ini, khususnya bagi kaum perempuan. Salah satu bentuk kekejaman yang dilakukan oleh militer Jepang adalah sistem perbudakan seksual yang dikenal sebagai "Jugun Ianfu". Sistem ini secara paksa menyediakan perempuan sebagai objek seksual bagi tentara Jepang, dengan iming-iming pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik, namun pada akhirnya mereka dikurung di barak militer dan tempat-tempat khusus yang disebut "ianjo". Para korban Jugun Ianfu mengalami penderitaan fisik yang sangat berat, trauma psikologis yang mendalam, dan stigma sosial yang meluas. Mereka mengalami pembungkaman sosial, pengucilan, dan kesulitan dalam mendapatkan pengakuan serta keadilan.

Dampak dari sistem ini tidak hanya dirasakan oleh para korban secara langsung, tetapi juga berlanjut hingga generasi berikutnya. Anak-anak dan cucu dari para korban Jugun Ianfu juga merasakan dampak psikososial yang membekas. Mereka tumbuh dalam keluarga dengan pola komunikasi yang tertutup, emosional yang tidak stabil, dan konflik internal yang tak disadari berasal dari trauma yang diwariskan. Tragedi Jugun Ianfu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual sistematis paling brutal dalam sejarah modern. Ribuan perempuan dari berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Sejarah kelam ini mengungkap betapa

mengerikannya dampak yang dirasakan oleh para korban Jugun Ianfu, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Daftar Pustaka

- Farisa, P. F. R., Ketaren, S. R. A., Dwiastuti, W., Rafie, M. T. Z., Setiawan, P. A., Amelia, S. M., & Widyaardana, F. (2024). Perawan Remaja yang Dilupakan: Studi Kasus Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14381457>
- Fitriani, L. (2021). *Stigma Sosial terhadap Korban Jugun Ianfu: Studi Kasus di Sumatera Barat*. Universitas Andalas.
- Heijmans, P. (2020). *Indonesia's Survivors of Japanese Wartime Sexual Slavery Speak Out*. The diplomat.
- International, A. (2007). *Breaking the Silence: Survivors of Japan's Military Sexual Slavery*.
- K.Sofianto. (2014). Garut Pada Masa Pemerintahan Jepang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 16(1).
- Lestari, E. (2017). Memori Kolektif Korban Jugun Ianfu di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 96.
- McDougall, G. J. (1998). *Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict*. Commission on Human Rights.
- Perempuan, K. (2013). *Catatan Kekerasan Seksual Masa Lalu: Jugun Ianfu*.
- Rahma, A. D., Suswandari, S., & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia*, 1(3), 169–182. <https://doi.org/10.22236/jhe.v1i3.4731>
- Sari, E. (2023). Jugun Ianfu: Wanita Penghibur dan Tentara Jepang 1941-1945. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1).
- Suliyati, T. (2018). Jugun Ianfu: Derita Perempuan dalam Pusaran Perang. *Kiryoku*, 2(3).
- Tanaka, Y. (2002). *Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and the US Occupation*. Routledge.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Wulandari, A. N., Tusaddiah, H., Sari, A. P., Pebrina, Y., & Waruwu, A.

(2024). Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. *Jurnal Sosial*, 4(3), 16869–16880. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10662>

Zulaicha, L. (2014). *Metologi Sejarah: buku perkuliahan Program S-1 jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*. IAIN Press.